

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan.

Masalah kemiskinan tampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan.² Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena kemiskinan merendahkan harkat dan masyarakat manusia, maka penanggulangan kemiskinan merupakan acuan penting dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, penurunan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau

² Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 25.

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam suatu masyarakat. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong orang miskin.³

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka mewujudkan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah.⁴ Oleh sebab itu wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, upaya-upaya menaggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan malah semakin deras mencuat ke permukaan.⁵

Penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari pembangunan memerlukan kesamaan persepsi berbagai pihak terkait serta keterpaduan pelaksanaannya untuk mendapatkan hasil yang tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan. Strategi yang diterapkan dalam berbagai program menggunakan prinsip dasar bahwa orang miskin apabila mempunyai kesempatan untuk

³ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. Xi.

⁴ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 307.

⁵ *Ibid.*, hlm. 308.

mengambil keputusan secara mandiri maka mereka dapat berbuat yang terbaik bagi diri, keluarga dan masyarakatnya. Prinsip ini lebih lanjut dituangkan ke dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan yang mengandalkan kekuatan masyarakat miskin setempat dengan fasilitas dari tenaga pendamping, aparat desa dan kecamatan. Mekanisme ini efektif menghidupkan proses pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu merencanakan, membangun, dan memelihara hasil kegiatan secara mandiri.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk Indonesia menunjukkan *trend* menurun secara melambat selama periode 2012-2015. Tingkat penurunan kemiskinan yang hanya mencapai 0,3 persen pada tahun 2015 adalah yang terkecil sepanjang periode empat tahun terakhir. Berdasarkan tabel 1.1, pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 29,13 juta jiwa atau 11,96 persen pada tahun 2012 menjadi 28,59 juta jiwa atau 11,22 persen pada Maret 2015. Meskipun menurun dibandingkan tahun 2012, tetapi semenjak tahun 2013, jumlah penduduk miskin selalu meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2015, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 310 ribu jiwa dari tahun 2014 dan 520 ribu jiwa dari tahun 2013. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi karena meningkatnya harga beberapa komoditas bahan pokok di pasaran dan naiknya harga bahan bakar minyak.⁶

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesejahteraan Masyarakat 2015/ Welfare Indicators 2015*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hlm. 132-133.

Tabel 1.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia, 2012-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ Pedesaan
2012	10,65	18,48	29,13	8,78	15,12	11,96
2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37
2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25
2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015

Terdapat dua kemungkinan pertambahan jumlah kaum miskin di perkotaan. *Pertama*, krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan seperti konstruksi, perdagangan, dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di perkotaan. *Kedua*, sementara penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi (memenuhi kebutuhan sendiri) dari produksi mereka sendiri, pertambahan harga bahan makanan mempengaruhi secara negatif pembeli pada umumnya lebih banyak dibanding pengaruhnya pada produsen makanan, yang mendatangkan penderitaan yang lebih banyak di antara rumah tangga perkotaan dibandingkan pedesaan.⁷

Antara tahun 1998-2001, pemerintahan baru Orde Reformasi yang dipimpin secara berturut-turut oleh B.J. Habibie, Abdurahman Wahid, dan Megawati membuat sejumlah program baru untuk menangani krisis ekonomi dengan program jaring

⁷ Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 7.

pengaman sosial. Program penyelamatan ini memainkan peran kunci dalam proses pemulihan ekonomi. Strateginya adalah dengan ketahanan pangan, memberikan perlindungan sosial dalam sektor pendidikan dan kesehatan dan menciptakan lapangan kerja produktif. Program ini mencakup PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), CRP (*Cost Reduction Program*) sebagai Program Pemulihan Masyarakat, KPK (Program Pengembangan Kecamatan). Pada program penanggulangan kemiskinan tingkat lokal, salah satu contohnya yakni program yang diadakan di kota Balikpapan, strategi diarahkan terhadap perbaikan kondisi hidup masyarakat kecil dan Program Penanggulangan Kemiskinan (PAP) di kota Balikpapan. Kedua program itu diprakarsai oleh pemerintah kota, yang meliputi pem-bangunan fasilitas masyarakat, pengelolaan lahan dan pinjaman rumah dengan memobilisasi sumber daya yang tersedia.⁸

Dalam implementasinya program-program tersebut acapkali tidak bisa berjalan sesuai target dan tujuan. Program tersebut dirancang dari pusat tanpa menghiraukan karakteristik masing-masing daerah dan perbedaan persoalan yang dihadapi. Masyarakat cuma dituntut partisipasinya tanpa dilibatkan dalam perencanaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Selain itu, program-program tersebut dianggap telah berhasil dalam mengatasi kemiskinan hanya ketika program tersebut masih berlangsung. Setelah program tersebut selesai, maka pemerintah dan masyarakat juga selesai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

⁸ Yogi Suprayogi Sugandi, "Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung", *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2016, hlm. 118-119.

pernah dicanangkan dalam program. Kondisi ini menjadikan program pengentasan kemiskinan tidak efektif.

Belajar dari pengalaman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masa lalu yang masih memberikan porsi yang sangat besar kepada birokrasi, maka digulirkan intervensi ekstrim Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang melompati jenjang birokrasi peran Pemda. P2KP adalah program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar ke depannya masyarakat dapat menolong dirinya sendiri.⁹ P2KP bertujuan bisa memulihkan dan mengokohkan kembali kelembagaan masyarakat di lokasi sasaran. Keberadaan lembaga masyarakat yang kokoh ini hanya bisa dicapai apabila lembaga tersebut benar-benar mengakar, representatif dan dipercaya oleh masyarakat di wilayahnya, sehingga mampu mengorganisir dan menjadi wadah sinergi masyarakat sekaligus menggalang potensi yang ada untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pembangunan permukiman di wilayahnya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, hal ini dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

⁹ Tim Persiapan P2KP Pusat, *Pedoman Umum Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)*, cet ke-2, (Jakarta: Sekretariat P2KP Pusat, 1999), hlm.24.

Tabel 1.2 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung, 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2012	94.300
2013	91.300
2014	88.989
2015	87.370
2016	84.350

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Tulungagung, telah diolah

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, memang dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin telah berkurang, namun hal tersebut menambah motivasi penulis untuk meneliti apakah memang benar Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ikut andil dalam proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung khususnya Kecamatan Boyolangu, sehingga angka jumlah kemiskinan di Kabupaten mengalami penurunan setiap tahunnya.

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan suatu program Nasional yang diadakan pemerintah untuk provinsi di Indonesia, seluruh kabupaten mendapat program tersebut, salah satunya yaitu kabupaten Tulungagung. Namun tidak semua kecamatan di kabupaten Tulungagung mendapatkan program tersebut, hanya 4 kecamatan yang mendapatkan program tersebut yang dianggap menjadi kecamatan penyangga kota Tulungagung, antara lain kecamatan Kauman,

Boyolangu, Ngunut dan Kedungwaru. Desa Pucungkidul merupakan salah satu desa di Kecamatan Boyolangu yang menerima dana Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sejak tahun 2005. Desa Pucungkidul merupakan kawasan padat penduduk dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani/ peternak, pedagang, penjahit konveksi, dan lain-lain. Sedangkan dilihat dari segi pendidikan kebanyakan warganya adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tidak sedikit pula yang putus sekolah sehingga menambah jumlah pengangguran di desa Pucungkidul.¹⁰

Dalam rangka untuk melaksanakan program dari P2KP maka dibentuklah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan forum masyarakat dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat setempat, yang berhak menilai rencana atau usulan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam jenis kegiatan P2KP. Terbentuknya dan berfungsinya BKM merupakan persyaratan bagi disalurkannya dana bantuan P2KP kepada masyarakat di kelurahan sasaran. Dalam jangka panjang, BKM merupakan forum yang bertugas mengelola berbagai persoalan kehidupan masyarakat yang bersangkutan, khususnya pengelolaan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Tujuan pembentukan BKM adalah untuk menumbuhkan kembali solidaritas sosial sesama warga agar dapat bekerja sama secara demokratis, sehingga mampu membangun kembali kehidupan masyarakat yang mandiri.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Arko (Kordinator BKM Pujasera) pada 9 Maret 2018.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Arko (Kordinator BKM Pujasera) pada 9 Maret 2018.

Di Desa Pucungkidul sendiri didirikan sebuah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Pujasera” (Pucungkidul Jaya Sejahtera). Dinamakan sebagai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Pujasera” (Pucungkidul Jaya Sejahtera) karena diharapkan dengan adanya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tersebut desa Pucungkidul menjadi lebih maju dan masyarakatnya menjadi semakin jaya dan sejahtera.

Program dari BKM Pujasera sendiri diberi nama dengan “Tri Daya”, di dalam program tersebut terdapat tiga aspek penting antara lain, aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada aspek lingkungan, BKM Pujasera lebih menekankan kepada perbaikan infrastruktur desa, seperti memasang paving di gang kecil dan membangun jembatan untuk memudahkan masyarakat mengakses jalan. Kemudian pada aspek sosial, BKM Pujasera juga telah memberikan bantuan kepada pihak yang kurang mampu, seperti memberikan santunan anak yatim, santunan orang jompo, sembako murah, mengadakan pengobatan gratis yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, serta juga telah memberikan bantuan peralatan alat tulis di Sekolah Dasar (SD). Adapun untuk aspek ekonomi sendiri juga telah dilaksanakannya program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada masyarakat yang kurang mampu/membutuhkan, dan program KSM ekonomi Bergulir.¹²

Sebagai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) diharapkan mampu mendorong dan memperkuat partisipasi masyarakat setempat

¹² Wawancara dengan Bapak Arko (Kordinator BKM Pujasera) pada 9 Maret 2018.

secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, program ini berpotensi sebagai ”gerakan masyarakat”, yakni: dari, oleh dan untuk masyarakat. Desa Pucungkidul adalah desa yang terbuka dalam menerima kemajuan sehingga proses dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di desa ini tidak terlalu sulit dalam pelaksanaannya, dan desa ini termasuk dalam desa yang memiliki rasa kekeluargaan yang besar dan akrab.

Dalam pandangan Islam sendiri, telah disebutkan bahwasannya sistem Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Allah SWT menganjurkan umatnya untuk bekerja, dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga dapat mencapai kesejahteraan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Jumu’ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”. (Q. S. al-Jumu’ah: 10)

Berdasarkan pemaparan dari ayat al-Qur’an di atas, dapat dipahami bahwa kesejahteraan dalam konsep Islam menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Seperti diketahui sebelum Adam dan isterinya diperintahkan turun ke bumi, maka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa,

sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.

Dari alasan tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dalam rangka mendiskripsikan keberhasilan pemanfaatan pinjaman dana dan pendampingan program P2KP dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan apabila dilihat dari prespektif ekonomi islam dengan judul Judul “Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut, penulis mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisa strategi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu.
2. Untuk menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu.

D. Pembatasan Masalah

a. Identifikasi Penelitian

a) Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah analisis tentang pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Secara empirik atau lapangan, dengan demikian, instrumen penelitian dapat dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara. Sudut pandang yang akan digunakan bersifat kualitatif dengan pola *descriptive analytic*.

c) Jenis Masalah

Masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

b. Batasan Masalah

Mengingat kompleksnya masalah yang ada serta untuk menghindari luasnya permasalahan, maka dalam pembahasan lebih lanjut akan dibatasi pada “Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pucungkidul Kecamatan Boyolangu)”.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah pandangan bahwa dalam pelaksanaan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) harus dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan tahapan-tahapan dan dikaitkan dengan konsep kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam yang memang telah di buat sebagai pedoman untuk menunjang pelakasanaanya agar tercapai hasil yang maksimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara jasmani maupun rohani.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Lembaga

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi BKM Pujasera untuk menyelesaikan dan mengatasi hambatan dari pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) di desa Pucungkidul.

b. Bagi Akademik

Sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan IAIN Tulungagung serta dapat menambah bahan referensi dari suatu karya ilmiah yang melakukan kajian terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP).

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan rujukan dan kajian ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah sejenis.

F. Definisi Istilah

1. Konseptual

Pengertian dari variabel-variabel yang diteliti dan yang akan dilakukan analisis lebih lanjut yakni antara lain variabel pelaksanaan/ implementasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan Kesejahteraan Masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

a) Program

Menurut Charles O. Jones pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.¹³ Program merupakan suatu rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan.

b) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat.

c) Kemiskinan

Secara harfiah menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, miskin berarti "tidak berharta benda, serba kurang/ berpenghasilan sangat rendah".¹⁴ Sedangkan menurut istilah kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.¹⁵

¹³ Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm.296.

¹⁴ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 581.

¹⁵ Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Jarnasy, 2004), hlm. 122.

d) Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁶

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penulisan dalam penelitian yang terdiri atas lima bab dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Pertama Pendahuluan di dalamnya memuat tujuh sub bab yakni: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Pembatasan Masalah, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua peneliti membahas tentang kerangka teoritis yang digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian, yang terdiri dari empat sub bab yaitu; Konsep Kemiskinan, Konsep Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP),

¹⁶ <http://www.bpn.go.id/> diakses pada tanggal 18 Januari 2018.

Konsep Kesejahteraan, dan memuat penelitian terdahulu untuk memperkuat penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini terdiri dari delapan sub bab, antara lain: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab empat ini terdiri dari tiga sub bab, antara lain: Deskripsi Data, Paparan Data, dan Analisa Data.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab lima terdiri dari dua sub bab, yaitu: Pembahasan tentang Strategi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Pucungkidul Boyolangu, dan Pembahasan tentang Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab enam ini terdiri dari dua sub bab, yakni kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti.